



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA**

NOMOR : W.30-058.PR.03 TAHUN 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, maka perlu membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);3. ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:
1. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing.
 2. Setiap Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Triwulan dan Tahunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dilaporkan kepada Kepala Satuan Kerja serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ANTHONIUS M. AYORBABA
NIP. 19710515 199610 1 001



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Papua
Nomor : W.30-058.PR.03 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Februari 2024

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024**

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Administrasi
Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Humas

NO	NAMA/NIP	SATUAN KERJA
1.	RONNAL LUMATAUW, A.Md., S.H., M.H. NIP. 19821202 200901 1 009	KANTOR WILAYAH
2.	SHINTA M.S. YARANGGA, S.E. NIP. 19930503 201901 2 001	DIVISI ADMINISTRASI (DUKMAN)
3.	ULFA NURAINI, S.Ak. NIP. 19971117 202203 2 006	DIVISI ADMINISTRASI (DUKMAN)
4.	AGUSTINA, S.H., M.H. NIP. 19840814 200604 2 001	DIVISI YANKUMHAM (DITJEN HAM)
5.	EKO RAHDIANSYAH, S.E. NIP. 19800716 200901 1 001	DIVISI YANKUMHAM (BSK)
6.	ANGGI FAJARWATI PERBASARI, S.H. NIP. 19850823 201012 2 001	DIVISI YANKUMHAM (DITJEN AHU)
7.	AGUSTINA IRJAWANTI RIKA PULALO NIP. 19890825 201402 2 002	DIVISI YANKUMHAM (DITJEN KI)

8.	HENDRA THAMRIN, S.H., M.H. NIP. 19860410 201212 1 001	DIVISI YANKUMHAM (DIJEN PP)
9.	AYU MUKTI SATYA, S.H. NIP. 19880103 202012 2 001	DIVISI YANKUMHAM (BPHN)
10.	PRAYOGO YUDI ABDULLAH NIP. 19960927 201712 1 001	DIVISI PEMASYARAKATAN
11.	MARIJKE YANI SISKAWAKUM, S.IP., M.AP NIP. 19920102 201504 2 001	DIVISI KEIMIGRASIAN
12.	TINEKE FRESSYE RUMBIK NIP. 19880226 201404 2 002	LP KELAS IIA ABEPURA
13.	AFILA MAGDALENA KAWER NIP. 19950211 201712 2 001	LP KELAS IIA NARKOTIKA
14.	WELLA JULIANI BELLATRIX MARJEN NIP. 19910716 201712 2 002	LP KELAS IIB BIAK
15.	NOVA TRI LESTARI NIP. 19971126 201712 2 002	LP KELAS IIB NABIRE
16.	FADLI NIP. 19891230 201012 1 007	LP KELAS IIB MERAUKE
17.	BAGAS ARMADA PUTRA NIP. 19990624 202012 1 001	LP KELAS IIB SERUI
18.	WELI ESTI RENY KARUBABA NIP. 20001213 202012 2 001	LP KELAS IIB WAMENA
19.	AURELIA VALERI ZWISZERA RAHARENG NIP. 19990801 201712 2 002	LP KELAS IIB TIMIKA
20.	RYAN REINALDI KAMBUAYA NIP. 19940422 201712 1 001	LPKA KELAS II JAYAPURA
21.	DENNY ZULHAM TANJUNG NIP. 19961031 201901 1 001	LP KELAS III TANAH MERAH
22.	MAULIDIYA CAHYANING RONI DEHI NIP. 20030508 202203 2 001	LPP KELAS III JAYAPURA

23.	SUSILOWATI, A.Md NIP. 19850921 200912 2 006	BAPAS KELAS II JAYAPURA
24.	DADANG TRIHATMOKO NIP. 19891028 201712 1 003	BAPAS KELAS II KEEROM
25.	MUHAMMAD AKBAR NIP. 19890712 200801 1 001	BAPAS KELAS II MERAUKE
26.	JANATUL FIRDAUS, A.Md.Kom NIP. 19820721 200912 1 001	RUPBASAN KELAS I JAYAPURA
27.	LIESTIARINI NIP. 19781026 200912 2 002	KANIM KELAS I TPI JAYAPURA
28.	AGRETHA SIANE GLORIOSA MISIRO NIP. 19970511 202012 2 001	KANIM KELAS II TPI MIMIKA
29.	HASNI LAMBE, A.Md.Kom., S.A.N NIP. 19810316 201012 2 002	KANIM KELAS II TPI BIAK
30.	LIDYA PRATIWI, A.Md NIP. 19940528 201901 2 001	KANIM KELAS II TPI MERAUKE
31.	NUR RISKY POSUMAH NIP. 19980731 201901 1 001	RUDENIM JAYAPURA

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
ANTHONIUS M. AYORBABA
NIP. 19710515 199610 1 001

